

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat Kematangan (maturity level) implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah Pemda Kabupaten Way Kanan menggunakan framework CMMI, beberapa simpulan dapat diambil:

1. Tingkat kematangan SPBE pada perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota bervariasi, tergantung pada kesiapan infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah, dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur. Beberapa daerah sudah mencapai tingkat kematangan yang cukup baik dengan adanya sistem yang terintegrasi dan otomatisasi layanan publik. Namun, masih ada daerah yang belum optimal dalam implementasi SPBE, dengan tantangan pada infrastruktur teknologi dan pengelolaan data.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kematangan SPBE di perangkat daerah antara lain:
 - a) Ketersediaan Infrastruktur Teknologi: Keberadaan jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai.
 - b) Kebijakan Pemerintah Daerah: Dukungan dari pemerintah daerah untuk menerapkan dan mengembangkan SPBE.
 - c) Kompetensi SDM: Kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi informasi.
 - d) Anggaran: Ketersediaan dana untuk pengembangan sistem dan pemeliharaan infrastruktur.
 - e) Budaya Organisasi: Kesiapan dan willingness dari aparatur untuk menerima perubahan digitalisasi.
3. Peran SDM: SDM memegang peran penting dalam pengelolaan SPBE, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan aplikasi sistem, mengolah data, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan yang dihadapi SDM:

- a) Kurangnya keterampilan teknis: Beberapa aparaturnya mungkin kurang terampil dalam menggunakan teknologi terkini.
 - b) Resistensi terhadap perubahan: Beberapa pegawai mungkin cenderung nyaman dengan metode manual dan enggan beralih ke sistem digital.
 - c) Kurangnya pelatihan: Pengembangan kapasitas SDM yang terbatas dalam hal pemahaman SPBE dan teknologi yang digunakan.
 - d) Keterbatasan jumlah SDM yang terlatih: Tidak semua daerah memiliki tenaga ahli TI yang cukup untuk mendukung implementasi SPBE secara maksimal
4. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi antara lain:
- a) Infrastruktur yang tidak memadai: Keterbatasan jaringan internet yang cepat dan perangkat keras yang sudah usang.
 - b) Kurangnya anggaran untuk pengembangan TI: Banyak daerah menghadapi masalah keterbatasan anggaran untuk membeli perangkat baru dan mengembangkan sistem.
 - c) Fragmentasi sistem: Banyak sistem yang digunakan di setiap perangkat daerah belum terintegrasi dengan baik, sehingga mempersulit pengelolaan data dan koordinasi antar instansi.
 - d) Resistensi terhadap perubahan budaya digital: Beberapa pegawai masih lebih memilih cara manual dalam menjalankan tugas mereka.
5. Proses pengelolaan SPBE biasanya diawali dengan penyusunan rencana strategis oleh pemerintah daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan implementasi sistem.
- a) Pengelolaan: Melibatkan tim internal yang terdiri dari pihak pengelola TI, serta melibatkan stakeholder dari berbagai instansi terkait untuk memastikan kelancaran implementasi SPBE.
 - b) Standarisasi: Perangkat daerah sering mengadopsi standar nasional yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atau kementerian terkait, guna memastikan integrasi sistem, keamanan data, dan pelayanan publik yang efisien.
 - c) Pembaruan dan pemeliharaan sistem: Pengelolaan berkelanjutan perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi dan pembaruan sistem secara periodik.
6. Pengukuran kinerja SPBE dapat dilakukan melalui beberapa metrik, seperti:

- a) Kecepatan dan Efisiensi Pelayanan Publik: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
 - b) Tingkat Kepuasan Pengguna: Masyarakat atau pengguna internal yang merasa puas dengan kemudahan dan kecepatan layanan berbasis SPBE.
 - c) Tingkat Keamanan dan Keandalan Sistem: Sejauh mana sistem dapat melindungi data dan berjalan dengan stabil tanpa gangguan.
 - d) Tingkat Pemanfaatan Sistem: Mengukur seberapa banyak instansi atau unit perangkat daerah yang aktif menggunakan SPBE.
 - e) Kesesuaian Anggaran dengan Kebutuhan TI: Sejauh mana anggaran yang dialokasikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan SPBE.
7. Dampak penerapan SPBE terhadap pelayanan publik antara lain:
- a) Peningkatan Efisiensi: Layanan publik yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien.
 - b) Aksesibilitas yang Lebih Baik: Masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dengan mudah melalui aplikasi atau platform online.
 - c) Transparansi dan Akuntabilitas: SPBE meningkatkan transparansi karena data dan layanan bisa dipantau dan diakses oleh publik, serta memudahkan pemantauan kinerja pemerintah.
 - d) Pengurangan Potensi Korupsi: Dengan otomatisasi sistem, peluang untuk praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir.
8. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
- a) Pelatihan dan Pengembangan SDM: Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada pegawai mengenai penggunaan teknologi dan sistem SPBE.
 - b) Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Mengembangkan infrastruktur yang lebih baik, termasuk jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai.
 - c) Penyusunan Kebijakan dan Standar yang Jelas: Menyusun kebijakan yang mendukung pengembangan SPBE dengan mengacu pada standar nasional dan internasional.
 - d) Kolaborasi antar Instansi: Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah untuk memastikan integrasi sistem dan berbagi data yang lebih baik.
 - e) Evaluasi dan Pemeliharaan Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala dan memperbarui sistem serta proses untuk memastikan SPBE tetap relevan dan efektif.

1.2. Saran

1. **Peningkatan Dokumentasi dan Standarisasi Proses**

Agar dapat mencapai **Level 4 (Quantitatively Managed)** dan **Level 5 (Optimizing)**, sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menyusun dan menerapkan standar prosedur yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik. Proses-proses terkait pengelolaan proyek, perubahan, serta keamanan sistem harus distandarisasi dan dipantau secara konsisten.

2. **Pengembangan Kompetensi SDM**

Faktor utama dalam meningkatkan tingkat Kematangan SPBE adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk melaksanakan program pelatihan bagi pegawai terkait teknologi informasi, manajemen proyek, serta pemahaman mengenai framework CMMI, untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengelolaan SPBE yang lebih baik.

3. **Pemanfaatan Teknologi dalam Keamanan Sistem**

Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu memprioritaskan peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi yang lebih canggih dan otomatis. Implementasi sistem keamanan yang terintegrasi dapat membantu mengurangi risiko kebocoran data dan ancaman terhadap sistem yang dapat merusak integritas layanan publik berbasis elektronik.

4. **Optimalisasi Penggunaan Data Kinerja**

Pemanfaatan data yang lebih terukur dan berbasis bukti sangat penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam SPBE. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mulai fokus pada pengumpulan dan analisis data kinerja yang lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini akan memungkinkan evaluasi yang lebih efektif dan pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

5. **Peningkatan Kolaborasi Antar-Instansi Pemerintah (SKPD/OPD)**

Untuk mendorong tercapainya tingkat Kematangan SPBE yang lebih tinggi, kolaborasi antar-instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah harus lebih diperkuat.

6. **Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya**

Untuk mendukung implementasi SPBE yang lebih baik, penting untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan proses SPBE. Pemerintah Kabupaten Way Kanan perlu memperhatikan kebutuhan infrastruktur seperti

jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang dapat mendukung operasional sistem pemerintahan berbasis elektronik secara optimal.